



# **DIKTAT**

Mata Kuliah

## **PENGANTAR ILMU POLITIK**

**Pengajar**

Ahmad Khoirul Umam, PhD

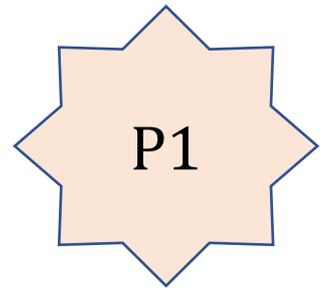
Semester Gasal 2021/2022

**Prodi Hubungan Internasional,  
Fakultas Falsafah & Peradaban  
Universitas Paramadina, Jakarta**

# Daftar Isi

	Halaman
Kelas ke-1: Pengantar Ilmu Politik.....	3
Kelas ke-2: Politik sebagai permainan kekuasaan.....	10
Kelas ke-3: Mengenali teori-teori politik .....	14
Kelas ke-4: Ideologi politik.....	19
Kelas ke-5: Negara dan kekuasaan.....	22
Kelas ke-6: Konstitusi.....	29
Kelas ke-7: Rejim Politik.....	33
Kelas ke-8: Ujian Tengah Semester.....	41
Kelas ke-9: Perilaku politik dan opini publik.....	42
Kelas ke-10: Komunikasi politik dan media .....	48
Kelas ke-11: Partai politik, kelompok kepentingan, dan pemilu .....	53
Kelas ke-12: Legislatif dan sistem pemerintahan .....	57
Kelas ke-13: Lembaga eksekutif dan birokrasi.....	62
Kelas ke-14: Lembaga judiciary dan peradilan.....	66
Kelas ke-15: Relasi ilmu politik dan hubungan internasional..... .....	71
Kelas ke-16: Ujian Akhir Semester.....	74

# **PENGANTAR ISU-ISU GLOBAL MASA KINI**



## **DESKRIPSI MATA KULIAH**

Mata kuliah ini bertujuan memperkenalkan ilmu politik kepada mahasiswa. Perkuliahan akan mencakup topic-topik apa itu politik dan ilmu politik, hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu lainnya, konsep-konsep dasar yang dipelajari dalam ilmu politik, mengapa perlu mempelajari ilmu politik, dan apa kegunaan ilmu politik dalam kehidupan sehari-hari.

## **CAPAIAN PEMBELAJARAN**

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa diharapkan:

1. Agar mahasiswa mengetahui dan memahami konsep politik dan ilmu politik serta hubungan di antara keduanya.
2. Agar mahasiswa mengetahui dan memahami konsep-konsep dasar ilmu politik seperti teori-teori politik, ideologi, negara, konstitusi, rejim politik, tingkahlaku politik, interaksi politik, institusi politik, dan bagian-bagian dari ilmu politik
3. Agar mahasiswa mengetahui dan memahami kegunaan mempelajari ilmu politik baik untuk kepentingan akademis maupun untuk kepentingan praktis
4. Melatih mahasiswa tentang bagaimana penggunaan ilmu politik dalam analisis berbagai peristiwa politik.

## SILABUS PEMBELAJARAN

KELAS KE-	MATERI	DOSEN	METODE
1	Pengantar Ilmu Politik	AKU	Online (zoom meeting)
2	Politik sebagai permainan kekuasaan	AKU	Online (zoom meeting)
3	Mengenal teori-teori politik	AKU	Online (zoom meeting)
4	Ideologi politik	AKU	Online (zoom meeting)
5	Negara dan kekuasaan	AKU	Online (zoom meeting)
6	Konstitusi	AKU	Online (zoom meeting)
7	Rejim Politik	AKU	Online (zoom meeting)
<b>8. Ujian Tengah Semester (UTS)</b>			
9	Perilaku politik dan opini publik	AKU	Online (zoom meeting)
10	Komunikasi politik dan media	AKU	Online (zoom meeting)
11	Partai politik, kelompok kepentingan, dan pemilu	AKU	Online (zoom meeting)
12	Legislatif dan sistem pemerintahan	AKU	Online (zoom meeting)
13	Lembaga eksekutif dan birokrasi	AKU	Online (zoom meeting)
14	Lembaga judiciary dan peradilan	AKU	Online (zoom meeting)
15	Hubungan ilmu politik dan hubungan internasional	AKU	Online (zoom meeting)
<b>16. Ujian Akhir Semester UAS: Keterangan: DR. AHMAD KHOIRUL UMAM (AKU)</b>			

## **KETENTUAN KEHADIRAN KELAS**

### **Metode Pembelajaran Daring**

- a) *Asynchronous* : diselenggarakan dengan menggunakan *platform eLearning* Paramadina; atau Whatsapp Group
- b) *Synchronous* : diselenggarakan dengan menggunakan *platform* Zoom

### **Tugas-tugas:**

- a) Sebelum pertemuan kelas: Membaca bahan perkuliahan terkait materi yang akan disampaikan pada saat kelas sebelumnya
- b) Nilai perkuliahan: Tugas terstruktur pada pertemuan kelas yang telah ditetapkan atau satu makalah ilmiah

## **TATA CARA PENILAIAN**

### **Bobot Penilaian:**

1. Rata-rata nilai yang diberikan Dosen selama perkuliahan adalah:
  - Keaktifan mahasiswa dan hasil tugas-tugas perkuliahan (20%)
  - Nilai Ujian Tengah Semester atau UTS (40%)
  - Nilai Ujian Akhir Semester atau UAS (40%)
  - Nilai akhir merupakan kewenangan Dosen untuk menentukannya sesuai kontrak yang telah disepakati. Apabila Dosen menilai perlu melakukan penyesuaian pembobotan nilai akhir dengan pertimbangan menjunjung tinggi kepentingan mahasiswa maka Dosen berhak melakukannya.
  - Hal-hal yang disepakati dalam kontrak ini dapat ditinjau kembali antara dosen dan mahasiswa di kemudian hari. Perubahan isi kontrak perkuliahan akan dilaksanakan dengan pemberitahuan.

## **Kriteria Penilaian:**

Nilai Interval

A	$\geq 85$
-A	80-84
B+	75-79
B	70-74
-B	65-69
C+	60-64
C	$\leq 55-59$
D	Indisipliner

## **Kontak**

Ahmad Khoirul Umam, Ph.D

[ahmad.khoirul@paramadina.ac.id](mailto:ahmad.khoirul@paramadina.ac.id)

Akses materi kuliah dan panduan perkuliahan:

<http://elearning.paramadina.ac.id>

## **Peraturan selama Penyelenggaraan Praktikum Daring**

### ***Asynchronous***

- Dosen berhak menentukan absensi sebagai penanda kehadiran berdasarkan pengisian langsung di *MyParmad* ataupun melalui bukti pengumpulan tugas.
- Pada pengisian langsung, Dosen akan melakukan pengisian BAP Perkuliahan *Online* di *MyParmad* sesuai dengan jadwal perkuliahan yang telah disepakati
- Jadwal perkuliahan pengganti yang telah disepakati Dosen dan Mahasiswa akan disesuaikan ketika Dosen menginformasikan kepada mahasiswa dan Bagian Akademik Universitas
- Pada pengisian kehadiran berdasarkan bukti pengumpulan tugas, Dosen akan melakukan koordinasi dengan Tim Akademik Program Studi untuk pengisian BAP maupun absensi mahasiswa.

### ***Synchronous***

- Dalam penyelenggaraan perkuliahan dengan metode *synchronous*, pengisian BAP perkuliahan *Online* di *MyParmad* baru akan dilakukan Dosen ketika perkuliahan selesai.
- Selama perkuliahan berlangsung, absensi dengan Google Form akan disebarkan dan mahasiswa wajib mengisi dengan melampirkan bukti foto mengikuti perkuliahan *online*.
- Selama perkuliahan berlangsung, setiap mahasiswa harus melakukan *mute audio* dan Dosen akan meminta untuk mengaktifkan audio apabila diperlukan.
- Selama perkuliahan berlangsung, sewaktu-waktu Dosen dapat meminta untuk mengaktifkan fitur video dan mahasiswa harus siap.

# **TUGAS PERKULIAHAN 1**

## **Capaian Belajar :**

Setelah menyelesaikan kelas pertama ini mahasiswa dapat memahami konteks mata kuliah Pengantar Ilmu Politik, sebagai fondasi untuk memahami kajian studi Hubungan Internasional lebih lanjut.

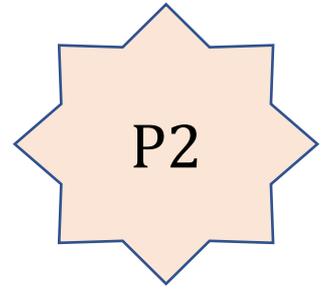
## **Cakupan Pemahaman**

- Penjelasan SAP
- Penjelasan metode perkuliahan
- Perumusan aturan perkuliahan
- Penjelasan komponen penilaian, tugas, dan lainnya.
- Pengenalan ilmu politik.
- Teori dan konsep dasar politik.
- Konteks isu-isu politik sebagai payung besar studi hubungan internasional.

## **TUGAS UNTUK PERKUALIAHAN SELANJUTNYA**

- Mahasiswa secara berkelompok melakukan telaah literatur tentang ilmu politik dan hubungannya dengan teori hubungan internasional
- Setelah menemukan artikel-artikel mengenai hal tersebut, diskusikan dan susun *summary* tentang konsep dasar ilmu politik.
- *Summary* disajikan dalam bentuk *power point* dan dikumpulkan kepada Dosen

# **POLITIK SEBAGAI PERMAINAN KEKUASAAN**



## **CAPAIAN BELAJAR**

Mahasiswa memahami dan bisa menjelaskan tentang pengetahuan umum mengenai unsur-unsur penting dalam pola-pola praktek politik: kompromi, kerjasama, kompetisi, tawar-menawar, aturan main, dan kesadaran publik.

## **POLA-POLA PRAKTEK POLITIK**

Politik adalah aktivitas atau praktik dalam mempengaruhi kebijakan publik dan pengambilan keputusan dalam suatu negara atau pemerintahan. Demokrasi, sebagai bentuk pemerintahan yang paling umum di seluruh dunia, memiliki pola-pola praktek politik yang khas, seperti kompromi, kerjasama, kompetisi, tawar-menawar, aturan main, dan kesadaran publik.

Kompromi adalah pola praktek politik yang umum dalam negara demokrasi. Ini terjadi ketika pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda mengambil sikap tengah dalam mencapai suatu kesepakatan. Kompromi memerlukan saling pengorbanan dari kedua belah pihak. Sebagai contoh, dalam pembuatan undang-undang, partai-partai politik yang berbeda harus mengambil sikap tengah untuk mencapai kesepakatan. Jika tidak, maka undang-undang itu tidak akan terbentuk. Hal ini juga dapat terjadi pada tingkat lokal dan regional.

Salah satu contoh kompromi politik terbaru adalah terkait dengan pemilihan umum di sejumlah negara. Karena adanya situasi darurat, banyak negara bagian mereka yang ingin melakukan pemungutan suara melalui surat atau secara online. Namun, beberapa partai politik tidak setuju dengan

cara ini dan menganggap bahwa hal ini akan meningkatkan kecurangan pemilihan. Untuk menyelesaikan perdebatan ini, beberapa negara bagian yang awalnya berencana untuk menggunakan surat suara atau pemungutan suara online, akhirnya mengadopsi cara pemungutan suara yang lebih konvensional.

Kerjasama adalah pola praktek politik di mana pihak-pihak yang berbeda bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Ini sering terjadi pada level pemerintahan, di mana berbagai badan pemerintah dan kementerian bekerja sama untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan yang sama. Kerjasama juga dapat terjadi antara negara-negara dalam memecahkan masalah bersama.

Kompetisi adalah pola praktek politik di mana pihak-pihak yang berbeda bersaing untuk mencapai tujuan yang sama. Ini terjadi pada level politik di mana partai politik bersaing untuk memenangkan pemilihan atau jabatan tertentu. Kompetisi juga terjadi antara negara-negara dalam hal perdagangan atau pengaruh global.

Tawar-menawar adalah pola praktek politik di mana pihak-pihak yang berbeda menawarkan atau menegosiasikan kesepakatan. Ini sering terjadi pada tingkat perdagangan antara negara-negara atau antara perusahaan-perusahaan. Tawar-menawar juga dapat terjadi dalam pembuatan kebijakan di mana pihak-pihak yang berbeda menawarkan alternatif atau mengajukan amendemen pada suatu kebijakan yang ada.

Contohnya adalah tawar-menawar yang terjadi dalam pembuatan undang-undang imigrasi di Amerika Serikat pada tahun 2018. Partai Republik ingin memberikan dukungan bagi imigran DACA (*Deferred Action for Childhood Arrivals*) sementara Partai Demokrat ingin memperluas jangkauan undang-undang imigrasi untuk keluarga imigran yang lebih

besar. Melalui tawar-menawar, kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan dan melewati undang-undang imigrasi yang baru.

Aturan Main adalah pola praktek politik yang menentukan batasan-batasan dalam proses politik. Ini termasuk hukum dan peraturan yang mengatur pemilihan umum, pencalonan, pengambilan keputusan, dan penyelesaian sengketa politik. Aturan main memastikan bahwa proses politik berjalan secara adil dan transparan.

Contohnya adalah pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 2020. Meskipun terdapat perdebatan yang sengit tentang cara pemungutan suara, aturan main yang berlaku di Amerika Serikat harus diikuti oleh semua partai politik. Ini termasuk penghitungan suara yang akurat, pemilihan suara yang dilakukan secara merata, dan prosedur lainnya yang mengatur proses pemilihan.

Kesadaran Publik adalah pola praktek politik di mana masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang proses politik dan isu-isu yang relevan. Kesadaran publik penting dalam demokrasi karena memastikan bahwa masyarakat dapat mengambil keputusan yang tepat dan informasi yang benar dalam proses politik.

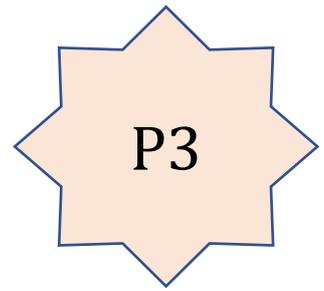
Contohnya adalah referendum Brexit di Inggris pada tahun 2016. Referendum ini memungkinkan masyarakat untuk memberikan suara mengenai apakah Inggris harus keluar dari Uni Eropa atau tetap berada di dalamnya. Kesadaran publik tentang masalah ini sangat penting karena memastikan bahwa masyarakat Inggris memahami implikasi dari keputusan mereka dalam jangka panjang.

Kesimpulannya, pola-pola praktek politik seperti kompromi, kerjasama, kompetisi, tawar-menawar, aturan main, dan kesadaran publik adalah penting dalam demokrasi. Setiap pola praktek politik ini memiliki keuntungan dan tantangan tersendiri. Namun, dengan penggunaan yang

tepat, pola praktek politik dapat membantu dalam mencapai tujuan politik dan memastikan bahwa proses politik berjalan dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi setiap negara demokrasi untuk memperhatikan dan mengembangkan pola praktek politik yang efektif dan transparan. Berikut adalah beberapa referensi yang bisa dibaca selanjutnya:

1. Dahl, R. (1989). *Democracy and Its Critics*. Yale University Press.
2. Diamond, L. (1999). *Developing Democracy: Toward Consolidation*. JHU Press.
3. Lijphart, A. (1999). *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. Yale University Press.
4. Mahler, G. (2016). *Comparative Politics: An Institutional and Cross-National Approach*. Routledge.
5. Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon and Schuster.

# **MENGENAL TEORI-TEORI POLITIK: KONTRAK SOSIAL & TEORI KONTEMPORER**



## **CAPAIAN PEMBELAJARAN**

Mahasiswa mampu memahami pemikiran politik Plato, Aristotle, Machiavelli, Hobbes, Locke dan Rousseau, marxist, behavioralisme, teori sistem, modernisasi, *rational choice*.

## **TEORI-TEORI DASAR PEMIKIRAN POLITIK**

Pemikiran politik telah berkembang sejak zaman kuno hingga saat ini. Beberapa pemikir politik terkenal yang memberikan kontribusi besar dalam pengembangan teori politik adalah Plato, Aristotle, Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau, Marxist, Behavioralisme, Teori Sistem, Modernisasi, dan *Rational Choice*.

1. Plato adalah seorang filsuf Yunani yang hidup pada abad ke-4 SM. Salah satu kontribusinya dalam teori politik adalah melalui karyanya yang berjudul "The Republic". Plato menyatakan bahwa negara yang ideal harus dipimpin oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan dan moral yang baik, yang disebut sebagai "philosopher-kings". Dia juga memperkenalkan konsep tiga kelas sosial, yaitu orang-orang yang memiliki kecerdasan, orang-orang yang memiliki kekuatan fisik, dan orang-orang yang memiliki keinginan untuk memimpin.
2. Aristotle adalah seorang filsuf Yunani yang hidup pada abad ke-4 SM dan juga merupakan murid dari Plato. Salah satu kontribusinya dalam

teori politik adalah melalui karyanya yang berjudul "Politics". Dia mengembangkan konsep tentang bentuk-bentuk pemerintahan, seperti monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Dia juga memperkenalkan konsep keadilan dan hukum, yang menurutnya harus menjadi dasar dari sistem politik yang baik.

3. Niccolo Machiavelli adalah seorang politisi dan filsuf Italia yang hidup pada abad ke-15. Salah satu kontribusinya dalam teori politik adalah melalui karyanya yang berjudul "The Prince". Dia menyatakan bahwa seorang pemimpin harus mengambil tindakan yang dibutuhkan untuk mempertahankan kekuasaannya, bahkan jika itu berarti harus melakukan tindakan yang tidak moral. Dia juga memperkenalkan konsep "the ends justify the means", yang mengarahkan tindakan seseorang pada akhir yang diinginkan, tidak peduli bagaimana caranya.
4. Thomas Hobbes adalah seorang filsuf Inggris yang hidup pada abad ke-17. Salah satu kontribusinya dalam teori politik adalah melalui karyanya yang berjudul "Leviathan". Dia menyatakan bahwa manusia secara alami cenderung menuju ke keadaan konflik dan kekerasan, dan hanya pemerintah yang kuat yang dapat mengontrol mereka. Dia memperkenalkan konsep "kontrak sosial", di mana orang-orang setuju untuk menyerahkan kekuasaan mereka pada pemerintah demi keamanan dan perlindungan.
5. John Locke adalah seorang filsuf Inggris yang hidup pada abad ke-17. Salah satu kontribusinya dalam teori politik adalah melalui karyanya yang berjudul "Two Treatises of Government". Dia menyatakan bahwa pemerintah harus bersifat representatif dan terbuka, dan kekuasaannya harus dibatasi oleh hak asasi manusia. Dia

memperkenalkan konsep hak-hak individu, seperti hak atas kebebasan, hak atas properti, dan hak atas hidup.

6. Jean-Jacques Rousseau adalah seorang filsuf Prancis yang hidup pada abad ke-18. Salah satu kontribusinya dalam teori politik adalah melalui karyanya yang berjudul "The Social Contract". Dia menyatakan bahwa manusia secara alami baik, namun dikorupsi oleh masyarakat dan kepentingan pribadi. Dia memperkenalkan konsep "volonté générale" atau kehendak umum, di mana keputusan politik harus didasarkan pada apa yang terbaik untuk masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya untuk individu atau kelompok kepentingan.
7. Marxisme adalah sebuah teori politik dan ekonomi yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels pada abad ke-19. Marxisme menganggap bahwa masyarakat terbagi menjadi kelas-kelas sosial, dan bahwa kelas-kelas sosial ini bersaing satu sama lain dalam perjuangan untuk kekuasaan dan sumber daya. Marxisme juga menekankan pentingnya perjuangan kelas, di mana kelas buruh harus bersatu untuk melawan kelas borjuis yang memegang kendali atas produksi dan kekayaan.
8. Behavioralisme adalah sebuah pendekatan dalam teori politik yang muncul pada akhir abad ke-20. Pendekatan ini menekankan pentingnya penelitian ilmiah dan data dalam memahami perilaku politik dan pengambilan keputusan. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya analisis objektif dan kritis terhadap proses politik, bukan hanya pandangan subjektif atau ideologis.
9. Teori Sistem adalah sebuah pendekatan dalam teori politik yang menekankan pentingnya memahami hubungan antara berbagai komponen dalam sistem politik secara holistik. Teori ini menganggap

sistem politik sebagai sebuah sistem yang kompleks dan terdiri dari banyak bagian yang saling terkait. Teori Sistem juga menekankan pentingnya interaksi antara sistem politik dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas.

10. Modernisasi adalah sebuah teori yang muncul pada pertengahan abad ke-20, yang menekankan pentingnya modernisasi dan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Teori ini menganggap bahwa pembangunan ekonomi dan politik harus didorong oleh modernisasi dan perubahan sosial, seperti peningkatan teknologi, pendidikan, dan nilai-nilai kemanusiaan.
11. *Rational Choice* adalah sebuah pendekatan dalam teori politik yang menekankan pentingnya pengambilan keputusan rasional dan berbasis pada kalkulasi terhadap alternatif yang ada. Pendekatan ini menganggap bahwa orang memilih tindakan yang akan memberikan manfaat tertinggi bagi diri mereka sendiri atau kelompok mereka, dan bahwa pilihan ini didasarkan pada informasi dan kalkulasi rasional yang mereka lakukan. Silakan cermati sejumlah rujukan berikut ini:

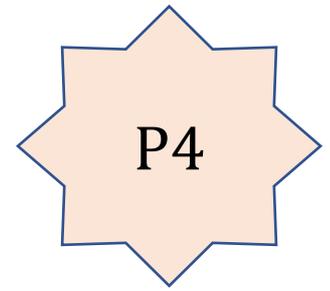
1. Heywood, A. (2013). *Politik: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
2. Roskin, M. G., Cord, R. L., Medeiros, J. A., & Jones, W. S. (2017). *Political Science: An Introduction*. Pearson.
3. Plato. (2019). *The Republic*. Cambridge University Press.
4. Aristotle. (1996). *Politics*. Hackett Publishing Company.
5. Machiavelli, N. (1998). *The Prince*. Penguin Classics.
6. Hobbes, T. (2016). *Leviathan*. Oxford University Press.
7. Locke, J. (1988). *Two Treatises of Government*. Cambridge University Press.
8. Rousseau, J. J. (1974). *The Social Contract*. Penguin Classics.

9. Marx, K., & Engels, F. (2018). *The Communist Manifesto*. Penguin Classics.
10. Easton, D. (1965). A Framework for Political Analysis. *World Politics*, 17(3), 383-400.
11. Dahl, R. A. (1961). *Who Governs? Democracy and Power in an American City*. Yale University Press.
12. Almond, G. A., & Powell, B. G. (1966). *Comparative Politics: A Developmental Approach*. Little, Brown & Co.
13. Parsons, T. (1951). *The Social System*. The Free Press.
14. Huntington, S. P. (1968). *Political Order in Changing Societies*. Yale University Press.
15. Downs, A. (1957). *An Economic Theory of Democracy*. Harper & Row.

### **TUGAS PERKULIAHAN SELANJUTNYA**

1. Masing-masing mahasiswa melakukan review lebih lanjut atas pemikiran-pemikiran politik di atas
2. Kumpulkan laporan dalam bentuk docs dan presentasi singkat dalam bentuk ppt ke [ahmad.khoirul@paramadina.ac.id](mailto:ahmad.khoirul@paramadina.ac.id)
3. Dalam pertemuan kelas selanjutnya, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil *review* artikel secara singkat dengan waktu per kelompok adalah 10 menit (presentasi dan Q&A).
4. Setiap kelompok dapat memperkaya paper atau bahan presentasinya dengan sumber-sumber lain yang relevan.

# **IDEOLOGI POLITIK DUNIA**



## **CAPAIAN PEMBELAJARAN**

Mahasiswa memahami mengenal ideologi-ideologi dasar politik dan ideologi kontemporer yang berpengaruh terhadap dinamika politik di berbagai negara dan dunia internasional.

## **RAGAM IDEOLOGI POLITIK GLOBAL**

Pemikiran politik memiliki beragam aliran yang berkembang seiring perjalanan waktu dan perubahan sosial-politik yang terjadi di dunia. Di antara aliran-aliran tersebut, terdapat beberapa aliran yang memiliki pengaruh besar dan masih menjadi topik diskusi dalam dunia politik hingga saat ini.

1. Liberalisme adalah sebuah aliran pemikiran yang menekankan pada nilai-nilai individualisme, persamaan hak, kebebasan, dan hak asasi manusia. Aliran ini memandang bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dengan bebas dan merdeka, serta memiliki hak untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri tanpa campur tangan pemerintah atau kelompok lainnya. Pada umumnya, liberalisme mendukung pemerintahan yang demokratis, pasar bebas, dan negara minimal.
2. Konservatisme adalah sebuah aliran pemikiran yang menekankan pada nilai-nilai tradisional dan konservatif dalam masyarakat. Aliran ini memandang bahwa kestabilan sosial dan politik dapat terwujud

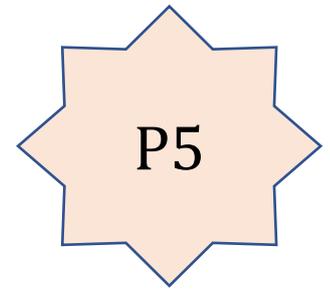
melalui pemeliharaan nilai-nilai yang sudah ada, seperti institusi sosial, adat, dan tradisi. Konservatisme juga mendukung kebijakan pemerintah yang konservatif dalam menjaga ketertiban dan mencegah perubahan sosial yang berlebihan.

3. Sosialisme adalah sebuah aliran pemikiran yang menekankan pada distribusi kekayaan yang lebih adil di masyarakat. Aliran ini memandang bahwa negara harus berperan aktif dalam mengendalikan dan mengatur distribusi sumber daya dan hasil produksi untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
4. Komunisme adalah sebuah aliran pemikiran yang memandang bahwa kepemilikan bersama atas sumber daya dan hasil produksi adalah cara terbaik untuk mencapai kesetaraan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Aliran ini menganggap bahwa negara harus mengambil alih semua sumber daya dan hasil produksi, sehingga tidak ada lagi pemilik individu dan kelas sosial yang berbeda.
5. Nasionalisme adalah sebuah aliran pemikiran yang menekankan pada kepentingan dan kebanggaan atas bangsa dan negara. Aliran ini memandang bahwa setiap bangsa memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, dan bahwa kepentingan nasional harus diutamakan di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu.
6. Neokonservatisme adalah sebuah aliran pemikiran yang menekankan pada penggunaan kekuatan militer dan kebijakan luar negeri yang tegas untuk memperkuat keamanan nasional. Aliran ini memandang bahwa tindakan keras dan intervensi militer dapat menjadi solusi terbaik dalam menghadapi ancaman keamanan negara dan membawa stabilitas ke seluruh dunia.

7. Feminisme adalah sebuah aliran pemikiran yang menekankan pada kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dalam masyarakat. Aliran ini memandang bahwa perempuan harus memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam politik, ekonomi, dan sosial. Feminisme juga mengkritisi dan menentang segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.
8. Environmentalisme adalah sebuah aliran pemikiran yang menekankan pada perlindungan lingkungan dan keberlanjutan hidup di planet ini. Aliran ini memandang bahwa manusia harus bertanggung jawab dalam memelihara kelestarian alam dan lingkungan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Environmentalisme juga mengkritisi dan menentang segala bentuk eksploitasi lingkungan yang merusak keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Untuk pemahaman lebih lanjut, bisa merujuk pada referensi berikut ini:

1. Heywood, Andrew. (2012). *Political Ideologies: An Introduction*. Palgrave Macmillan.
2. Roskin, Michael G. et al. (2019). *Political Science: An Introduction*. Pearson Education, Inc.
3. McLean, Iain and McMillan, Alistair. (2009). *The Concise Oxford Dictionary of Politics*. Oxford University Press.
4. Cahoone, Lawrence. (2013). *Theories of Culture: A New Agenda for Theology*. Routledge.
5. Detterman, Doug. (2018). *What is Neoliberalism?* Investopedia.
6. Cullen, Jim. (2019). *Conservative Political Ideology: Overview and Characteristics*. ThoughtCo

# NEGARA & KEKUASAAN



## CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa memahami dan bisa menjelaskan berbagai bentuk rezim kekuasaan negara, seperti negara kesatuan, negara federal, sistem pemilu, dan juga sistem ekonomi yang dijalankan negara-negara di dunia.

### BENTUK-BENTUK KEKUASAAN NEGARA

Rezim kekuasaan negara merupakan bentuk organisasi dan struktur pemerintahan suatu negara yang mempengaruhi cara negara tersebut dijalankan. Ada berbagai bentuk rezim kekuasaan negara yang ada di dunia, termasuk diantaranya negara kesatuan, negara federal, sistem pemilu, dan sistem ekonomi. Berikut ini adalah penjelasan lebih detail mengenai bentuk-bentuk rezim kekuasaan negara dan sistem ekonomi yang dijalankan oleh negara-negara di dunia.

1. Negara Kesatuan. Negara kesatuan merupakan bentuk pemerintahan yang di mana kekuasaan pusat negara dipegang oleh satu pemerintah pusat yang kuat, dan kekuasaan daerah hanya merupakan kekuasaan turunan dari pusat. Pemerintah pusat memiliki kendali penuh atas segala aspek kehidupan di dalam negara tersebut, termasuk pemerintahan daerah, dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan bersifat universal. Negara kesatuan umumnya cocok untuk negara yang relatif kecil dan homogen dalam hal budaya, bahasa, dan agama.

Contoh negara kesatuan di dunia ini adalah Indonesia, Jepang, dan Prancis.

2. Negara Federal. Negara federal merupakan bentuk pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh dua atau lebih pemerintah, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kekuasaan pusat dan daerah dalam negara federal memiliki otonomi yang relatif, dengan kekuasaan pusat terbatas oleh konstitusi dan hukum federal. Negara federal umumnya cocok untuk negara yang memiliki wilayah yang luas dan keragaman budaya, bahasa, dan agama. Contoh negara federal di dunia ini adalah Amerika Serikat, Australia, dan Jerman.
3. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan merupakan cara atau mekanisme yang digunakan oleh suatu negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Sistem pemerintahan biasanya ditentukan oleh konstitusi negara yang bersangkutan. Berikut ini adalah beberapa bentuk sistem pemerintahan yang umum diterapkan oleh negara-negara di dunia.
  - a. Monarki. Monarki merupakan bentuk sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja atau ratu. Pemimpin monarki biasanya ditentukan berdasarkan garis keturunan atau pewarisan tahta. Ada dua jenis monarki, yaitu monarki absolut dan konstitusional. Monarki absolut adalah bentuk monarki di mana raja memiliki kekuasaan mutlak dan tidak terbatas, sedangkan monarki konstitusional adalah bentuk monarki di mana raja hanya memiliki peran seremonial dan kekuasaan sebenarnya dipegang oleh parlemen atau pemerintahan yang dipilih. Contoh negara yang menganut sistem monarki adalah Kerajaan Inggris, Kerajaan Saudi Arabia, dan Kerajaan Thailand.

- b. Republik. Republik adalah bentuk sistem pemerintahan di mana kepala negara dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum atau dipilih oleh anggota parlemen. Dalam republik, kekuasaan dipegang oleh rakyat atau wakil rakyat yang dipilih. Ada beberapa jenis republik, seperti republik presidensial, republik parlementer, dan republik semi-presidensial. Contoh negara yang menganut sistem republik adalah Amerika Serikat, Prancis, dan Indonesia.
- c. Sistem Parlementer. Sistem parlementer adalah bentuk sistem pemerintahan di mana eksekutif (kepala pemerintahan) tergantung pada dukungan mayoritas parlemen. Dalam sistem ini, anggota parlemen dipilih oleh rakyat dan mereka memilih pemimpin mereka untuk menjadi perdana menteri atau kepala pemerintahan. Sistem parlementer cenderung memperkuat peran parlemen dan membatasi kekuasaan presiden atau kepala negara. Contoh negara yang menganut sistem parlementer adalah Inggris, Jepang, dan India. Sistem pemerintahan parlementer terdiri dari dua organ utama, yaitu eksekutif dan legislatif. Eksekutif dipilih oleh legislatif atau parlemen dan dipimpin oleh seorang perdana menteri. Perdana menteri dan kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat dipaksa mundur oleh parlemen melalui mosi tidak percaya. Sistem parlementer biasanya ditemukan di negara-negara seperti Inggris, Kanada, dan Australia. Kelebihan dari sistem ini adalah memungkinkan pemerintahan yang stabil dan terorganisir dengan baik, karena perdana menteri dan kabinetnya harus mempertanggungjawabkan kinerja mereka kepada parlemen dan bisa saja dicopot jika tidak memenuhi

harapan. Namun, sistem parlementer juga memiliki kekurangan, yaitu memperlambat proses pembuatan keputusan. Karena perdana menteri harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada parlemen, ia harus selalu memperhatikan opini dan kepentingan parlemen dalam setiap keputusan yang diambil. Ini bisa memakan waktu yang lama dan memperlambat proses pembuatan keputusan.

- d. Sistem Presidensial. Sistem presidensial adalah bentuk sistem pemerintahan di mana presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan mempunyai kekuasaan eksekutif yang besar dalam menjalankan pemerintahan. Contoh negara yang menganut sistem presidensial adalah Amerika Serikat, Brasil, dan Meksiko.
- e. Sistem Semi-Presidensial. Sistem pemerintahan semi-presidensial memiliki kelebihan dari kedua sistem pemerintahan sebelumnya, yaitu memiliki eksekutif yang kuat seperti pada sistem presidensial dan memiliki mekanisme check and balance seperti pada sistem parlementer. Dalam sistem ini, eksekutif dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan dibantu oleh perdana menteri. Sistem semi-presidensial biasanya ditemukan di negara-negara seperti Prancis, Rusia, dan Taiwan. Kelebihan dari sistem ini adalah dapat memberikan stabilitas pemerintahan yang baik serta menghindari terjadinya konflik antara presiden dan parlemen. Namun, kekurangannya adalah sulitnya menentukan kewenangan antara presiden dan perdana menteri, sehingga bisa terjadi tumpang tindih kewenangan dan konflik kepentingan.

4. Sistem pemilu merupakan bentuk proses pemilihan umum yang dijalankan oleh negara untuk menentukan siapa yang akan memimpin negara dalam suatu periode waktu tertentu. Sistem pemilu terdiri dari berbagai macam, mulai dari sistem presidensial hingga sistem parlementer. Sistem pemilu juga dapat dibedakan berdasarkan cara pemilihan dan kuota suara yang diperlukan untuk memenangkan suatu kursi. Contoh sistem pemilu di dunia ini adalah sistem presidensial yang digunakan oleh Amerika Serikat dan Prancis, dan sistem parlementer yang digunakan oleh Inggris dan Kanada. Ada beberapa jenis sistem pemilu yang berbeda di seluruh dunia, dengan beberapa yang lebih umum daripada yang lain. Beberapa contoh sistem pemilu meliputi:

- a. Sistem pemilihan umum tunggal: Setiap pemilih memiliki satu suara dan kandidat yang memenangkan suara terbanyak menjadi pemenang. Sistem ini digunakan di Inggris dan Amerika Serikat.
- b. Sistem pemilihan dua putaran: Dalam sistem ini, jika tidak ada kandidat yang memenangkan mayoritas suara dalam putaran pertama, dua kandidat dengan suara terbanyak mengikuti putaran kedua. Sistem ini digunakan di Prancis dan Rusia.
- c. Sistem proporsional: Di sini, partai politik diberi jumlah kursi berdasarkan persentase suara yang mereka terima. Sistem ini digunakan di negara-negara seperti Jerman dan Israel.
- d. Sistem campuran: Ini adalah kombinasi dari sistem pemilihan umum tunggal dan proporsional, di mana beberapa kursi diberikan melalui pemungutan suara tunggal dan beberapa

melalui proporsi suara partai. Sistem ini digunakan di Selandia Baru dan Jepang.

5. Sistem ekonomi negara adalah cara negara mengatur produksi, distribusi, dan penggunaan sumber daya ekonomi. Ada beberapa jenis sistem ekonomi yang berbeda di seluruh dunia, termasuk:
  - a. Kapitalisme: Di bawah sistem ini, produksi dan distribusi sumber daya diatur oleh pasar bebas dan keuntungan menjadi tujuan utama. Kapitalisme digunakan di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris.
  - b. Sosialisme: Di bawah sistem ini, produksi dan distribusi sumber daya diatur oleh negara dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sosial. Sosialisme digunakan di negara-negara seperti Kuba dan Tiongkok.
  - c. Komunisme: Sistem ini menganggap kepemilikan bersama dan pengaturan produksi oleh negara sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial. Komunisme digunakan di negara-negara seperti Korea Utara.
  - d. Pasar campuran: Ini adalah kombinasi dari kapitalisme dan sosialisme, di mana pasar bebas digabungkan dengan kontrol negara pada beberapa aspek ekonomi. Sistem ini digunakan di negara-negara seperti Kanada dan Australia.

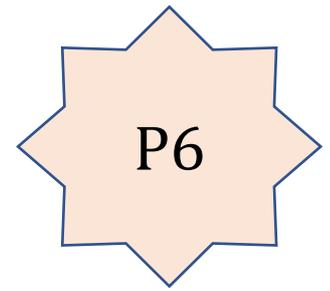
Untuk lebih jelasnya, silakan cermati literatur berikut ini:

1. Heywood, A. (2013). *Politics* (4th ed.). Palgrave Macmillan.
2. Sartori, G. (2011). *Comparative constitutional engineering: An inquiry into structures, incentives and outcomes*. Palgrave Macmillan.
3. Hill, C., & Hughes, R. (2017). *Contemporary politics and society in the United States*. Routledge.
4. Cohen, J. L. (2008). *Capitalism, freedom, and the proletariat*. In D. D. Sayer & J. Michael (Eds.), *The Blackwell Companion to Capitalism* (pp. 191-205). Blackwell Publishing.

### **TUGAS PERKULIAHAN SELANJUTNYA**

- Mahasiswa secara berkelompok menentukan poin-poin kekuasaan negara, bentuk negara, sistem pemilu, sistem ekonomi dan lainnya
- Selanjutnya, poin-poin tersebut akan didiskusikan dalam kelas selanjutnya.

# KONSTITUSI NEGARA MODERN



## CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa memahami dan bisa menjelaskan tentang konstitusi di dunia moderen, sifat dan fungsi, serta perubahan konstitusi.

## KONSTITUSI NEGARA

Konstitusi merupakan hukum tertinggi di suatu negara yang berisi aturan-aturan dasar mengenai pemerintahan, hak-hak dan kewajiban warga negara, dan juga batasan kekuasaan negara. Konstitusi sering dianggap sebagai dokumen yang penting dan suci dalam suatu negara karena berisi landasan bagi penyelenggaraan negara dan menjamin keadilan, kebebasan, dan hak-hak rakyat. Konstitusi memiliki sifat dan fungsi yang sangat penting dalam suatu negara. Beberapa sifat konstitusi antara lain:

1. Tertulis. Sebagian besar konstitusi di dunia modern tertulis dan terdokumentasi secara resmi. Konstitusi yang tertulis memberikan kejelasan dan kepastian hukum sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dan panduan bagi seluruh warga negara.
2. Suci. Konstitusi dianggap sebagai dokumen yang suci dan berlaku untuk semua orang, termasuk penguasa dan warga negara. Hal ini menjadikan konstitusi sebagai jaminan atas perlindungan hak-hak warga negara dan juga sebagai pengekanng kekuasaan pemerintah.

3. Tetap. Konstitusi memiliki sifat tetap dan tidak mudah berubah, kecuali melalui prosedur yang telah ditentukan dalam konstitusi itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas dan kepastian hukum.

Sementara itu, fungsi konstitusi meliputi:

1. Sebagai Panduan. Konstitusi menjadi panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi sumber acuan dalam menentukan hak dan kewajiban warga negara.
2. Sebagai Pelindung Hak-Hak Warga Negara. Konstitusi melindungi hak-hak warga negara, seperti hak atas kebebasan berekspresi, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan lain sebagainya.
3. Sebagai Pengekang Kekuasaan Pemerintah. Konstitusi menjadi alat untuk mengendalikan kekuasaan pemerintah dan menjamin bahwa kekuasaan pemerintah tidak melampaui batas-batas yang telah ditetapkan dalam konstitusi.

Selanjutnya, konstitusi dapat mengalami perubahan atau amendemen jika diperlukan. Perubahan konstitusi dilakukan melalui prosedur yang telah ditentukan dalam konstitusi itu sendiri. Perubahan konstitusi dilakukan dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Beberapa negara di dunia mengalami perubahan konstitusi yang signifikan dalam sejarahnya. Misalnya, di Amerika Serikat, konstitusi telah mengalami 27 amendemen sejak diratifikasi pada tahun 1788. Amendemen tersebut meliputi perlindungan hak-hak sipil, hak untuk memilih, larangan diskriminasi berdasarkan ras, gender, agama, dan lain-lain.

Konstitusi tidak selalu tetap dan tidak dapat berubah. Konstitusi dapat berubah sebagai akibat dari perubahan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya atau sebagai akibat dari perubahan politik atau sosial di masyarakat. Ada beberapa cara untuk mengubah konstitusi, yang paling umum adalah:

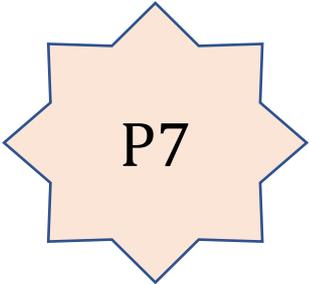
1. Amandemen adalah proses formal untuk mengubah atau menambah konstitusi. Di beberapa negara, amandemen hanya bisa dilakukan oleh badan tertentu, seperti parlemen atau konvensi konstitusional. Di negara lain, rakyat dapat memilih untuk mengubah konstitusi melalui referendum. Beberapa negara memerlukan persetujuan khusus dari mayoritas atau super mayoritas untuk mengamandemenkan konstitusi.
2. Interpretasi Konstitusi. Di beberapa negara, hakim dapat menafsirkan konstitusi secara berbeda dari interpretasi asli atau yang dimaksudkan oleh para pembuat konstitusi. Proses ini sering disebut sebagai "penafsiran konstitusi", dan sering kali terjadi dalam hal hak asasi manusia dan isu-isu yang berkaitan dengan kebebasan sipil.
3. Perubahan Kebiasaan dan Praktek. Konstitusi juga dapat diubah dengan perubahan kebiasaan dan praktek di dalam sistem politik. Misalnya, di Amerika Serikat, kebiasaan penggunaan filibuster di Senat AS telah mengubah praktik legislatif, meskipun hal itu tidak tercantum dalam konstitusi.

Perubahan konstitusi dapat menjadi kontroversial dan sulit untuk dicapai, terutama jika perubahan tersebut melibatkan isu-isu sensitif seperti hak-hak sipil dan kebebasan individu. Namun, dengan adanya mekanisme perubahan, konstitusi dapat berkembang dan menyesuaikan diri dengan

perubahan dalam masyarakat dan politik. Untuk lebih lanjut, bisa mencermati bahan bacaan berikut ini:

1. Rosenfeld, M. (2011). *The Constitution: Understanding America's Founding Document*. Oxford University Press.
2. Tushnet, M. (2009). Constitution making. *Handbook of Comparative Constitutional Law*, 47-70.
3. Elster, J. (1995). Forces and mechanisms in the constitution-making process. *Duke Law Journal*, 45(2), 364-396.
4. Horowitz, D. L. (1992). Constitutional reform and the problem of communal conflict. *Journal of Democracy*, 3(4), 115-128.

# DEMOKRASI & OTORITARIANISME



P7

## CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa diharapkan bisa memahami dan bisa menjelaskan tentang *Representative Democracy*, serta konsep-konsep kekuasaan totalitarianisme, authoritarianisme, dan demokrasi.

## KEKUASAAN DEMOKRASI & OTORITARIANISME

*Representative Democracy* adalah bentuk pemerintahan di mana warga negara memilih wakil yang akan mewakili kepentingan mereka di lembaga legislatif atau eksekutif. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan melalui pemilihan umum yang diadakan secara teratur.

Namun, sistem pemerintahan yang demokratis tidak selalu dapat dijalankan secara efektif. Ada banyak negara yang memiliki sistem pemerintahan yang tidak demokratis, seperti totalitarianisme dan authoritarianisme. Dalam sistem kekuasaan ini, pemerintah atau pemimpin memiliki kendali mutlak atas seluruh kegiatan politik dan masyarakat.

Totalitarianisme adalah bentuk pemerintahan di mana pemerintah memiliki kendali total atas seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, sosial, dan politik. Seluruh kegiatan masyarakat diatur oleh pemerintah dan tidak ada kebebasan berpendapat atau tindakan tanpa persetujuan dari pemerintah.

Sementara itu, authoritarianisme adalah sistem pemerintahan di mana pemerintah atau pemimpin memiliki kendali mutlak atas kegiatan politik,

tetapi masih memperbolehkan kegiatan ekonomi dan sosial dalam batas-batas tertentu. Kebebasan berpendapat dan bertindak terbatas pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemimpin.

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat dan dijalankan melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Prinsip-prinsip demokrasi termasuk kebebasan berpendapat dan tindakan, hak asasi manusia, hak pilih, dan kebebasan pers. Konsep-konsep ini mengakui pentingnya partisipasi aktif dari seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan politik dan kebijakan publik.

Namun, demokrasi juga dapat terancam oleh beberapa faktor. Beberapa contohnya adalah korupsi, ketidakadilan sosial, ekonomi dan politik, serta kekuasaan yang terlalu terpusat pada satu kelompok atau individu. Selain itu, terdapat juga bentuk-bentuk negara yang kurang mengakomodasi hak-hak minoritas atau golongan tertentu.

*Representative Democracy* adalah bentuk pemerintahan yang paling umum digunakan di dunia saat ini. Sistem ini melibatkan pemilihan wakil rakyat oleh masyarakat untuk mewakili mereka dalam membuat keputusan politik. Pemilihan dilakukan secara reguler, biasanya setiap empat atau lima tahun, dan wakil rakyat yang terpilih akan menjadi anggota parlemen atau dewan perwakilan rakyat. Mereka akan bertanggung jawab atas membuat undang-undang dan mengevaluasi tindakan pemerintah. Sistem *Representative Democracy* diterapkan di banyak negara di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Jepang.

Namun, ada juga konsep-konsep kekuasaan lain yang berbeda dengan *Representative Democracy*, yaitu totalitarianisme, authoritarianisme, dan demokrasi. Totalitarianisme adalah bentuk pemerintahan yang sangat otoriter dan mengontrol seluruh aspek kehidupan warga negaranya. Seluruh keputusan politik dan sosial dikendalikan oleh pemerintah, tanpa adanya

kebebasan atau hak individu. Contoh negara yang menganut pemerintahan totalitarian adalah Korea Utara dan bekas Uni Soviet.

Sedangkan, authoritarianisme adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan terpusat pada satu individu atau kelompok kecil. Meskipun terdapat aturan dan hukum yang mengatur, keputusan politik yang signifikan diambil oleh penguasa tanpa melibatkan partisipasi rakyat. Beberapa contoh negara yang menganut pemerintahan authoritarian adalah China dan Rusia.

Sementara itu, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana rakyat memiliki hak untuk memilih perwakilan mereka dan ikut serta dalam proses pembuatan keputusan politik. Demokrasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, seperti demokrasi langsung, demokrasi terwakili, dan demokrasi semi-presidensial. Demokrasi telah menjadi semakin umum di seluruh dunia sejak akhir abad ke-20.

Konsep kekuasaan ini berbeda satu sama lain, dan masing-masing memiliki karakteristik unik. Pada dasarnya, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang paling diinginkan oleh sebagian besar orang karena memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengambil bagian dalam proses politik dan memiliki hak yang dijamin oleh konstitusi. Di sisi lain, totalitarianisme dan authoritarianisme adalah bentuk pemerintahan yang sangat otoriter, di mana hak dan kebebasan individu sangat dibatasi.

Namun, pada kenyataannya, tidak semua negara yang menganut sistem demokrasi dapat memberikan kebebasan dan hak yang sepenuhnya bagi rakyatnya. Ada negara-negara yang dianggap sebagai "demokrasi cacat" karena masih terdapat kekurangan dalam perlindungan hak asasi manusia, penindasan terhadap oposisi politik, dan terbatasnya kebebasan pers dan media.

Kekuasaan totalitarianisme sangat terpusat pada satu pemimpin atau kelompok kecil yang mengambil keputusan atas nama rakyat tanpa melibatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Tindakan pemerintah dapat berada di luar kendali hukum dan melanggar hak asasi manusia. Sedangkan kekuasaan authoritarianisme mencakup pemerintahan yang berkuasa secara mutlak namun mengindahkan aturan hukum dan mengakui kebebasan individu dalam batas-batas tertentu. Negara dengan kekuasaan authoritarianisme umumnya memiliki kontrol yang ketat terhadap media massa dan oposisi politik.

Di sisi lain, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi publik. Representative democracy adalah bentuk demokrasi di mana rakyat memilih wakil mereka untuk mewakili mereka dalam pengambilan keputusan politik. Bentuk demokrasi ini umumnya diadopsi oleh banyak negara di dunia, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan sebagian besar negara-negara Eropa.

Dalam *representative democracy*, setiap warga negara memiliki hak suara untuk memilih perwakilan mereka dalam pemerintahan. Kekuasaan pemerintah dipisahkan menjadi tiga cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden atau perdana menteri, kekuasaan legislatif dipegang oleh parlemen atau kongres, dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh pengadilan. Setiap cabang kekuasaan bertanggung jawab atas fungsi-fungsi tertentu dan dapat saling mengontrol dan seimbangkan satu sama lain.

Namun, *representative democracy* juga memiliki kelemahan. Salah satunya adalah sulitnya mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam keputusan politik. Kebanyakan negara berpenduduk kecil atau berpendapatan rendah memiliki jumlah suara yang lebih sedikit dalam

pemerintahan internasional, seperti PBB. Selain itu, kandidat yang memenangkan pemilihan umum mungkin tidak selalu mewakili kepentingan seluruh rakyat, dan terkadang mengabaikan suara minoritas.

Kekuasaan totalitarianisme, authoritarianisme, dan demokrasi adalah tiga bentuk kekuasaan yang berbeda di dunia politik. Kekuasaan totalitarianisme sangat terpusat pada satu pemimpin atau kelompok kecil yang mengambil keputusan atas nama rakyat tanpa melibatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Kekuasaan authoritarianisme mengakui kebebasan individu dalam batas-batas tertentu dan berkuasa secara mutlak namun mengindahkan aturan hukum. Sementara demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi publik.

Dalam *representative democracy*, kekuasaan pemerintah dipegang oleh perwakilan yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Model ini menjadi populer di banyak negara modern, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan sebagian besar negara-negara Eropa. *Representative democracy* juga dikenal dengan sebutan republik, dan sering dianggap sebagai alternatif yang lebih moderat dan stabil dari sistem demokrasi langsung.

Namun, sebagian negara masih mengadopsi sistem kekuasaan totalitarianisme atau authoritarianisme, yang memberikan kekuasaan penuh kepada pemerintah tanpa ada kendali dari rakyat. Contoh negara yang mengadopsi sistem ini antara lain Korea Utara, Cina, dan Rusia.

Sistem kekuasaan totalitarianisme mengacu pada bentuk pemerintahan yang sangat otoriter, di mana pemerintah memiliki kendali penuh atas seluruh aspek kehidupan warga negara, termasuk kebebasan berekspresi, hak asasi manusia, dan hak-hak sipil lainnya. Hal ini biasanya dicapai melalui penggunaan kekerasan atau intimidasi oleh pemerintah, dan sering kali melibatkan pemusnahan oposisi politik atau kelompok-kelompok

minoritas. Sedangkan sistem kekuasaan authoritarianisme adalah bentuk pemerintahan di mana pemerintah memiliki kontrol penuh atas negara, tetapi masih mempertahankan beberapa mekanisme demokrasi seperti pemilihan umum. Namun, pemilihan ini sering kali tidak adil dan terjadi kecurangan, atau hanya sebagai formalitas belaka tanpa memberikan pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan.

Sebaliknya, demokrasi merupakan bentuk sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat melalui pemilihan umum yang adil dan bebas. Konsep demokrasi awalnya muncul di Yunani Kuno dan berkembang menjadi berbagai bentuk di seluruh dunia, seperti demokrasi langsung dan *representative democracy*.

Demokrasi langsung adalah bentuk demokrasi di mana warga negara memutuskan keputusan politik secara langsung, tanpa melalui perwakilan. Sementara itu, *representative democracy* merupakan bentuk demokrasi di mana warga negara memilih perwakilan mereka untuk membuat keputusan politik atas nama mereka.

Namun, meskipun demokrasi dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang lebih adil dan terbuka, namun demokrasi juga memiliki kekurangan dan tantangan, seperti adanya kecenderungan oligarki atau pengambilan keputusan yang lambat. Dalam menerapkan sistem pemerintahan yang baik, tidak hanya diperlukan pemilihan umum yang bebas dan adil, tetapi juga perlunya kontrol terhadap kekuasaan pemerintah. Hal ini dapat dicapai melalui penerapan prinsip-prinsip seperti pemisahan kekuasaan, hak-hak sipil yang dijamin, kebebasan pers dan media, dan perlindungan terhadap korupsi.

Dalam sistem ini, warga negara memilih perwakilan mereka untuk memimpin dan membuat keputusan di pemerintahan. Sistem ini memiliki keuntungan seperti mewakili kepentingan berbagai kelompok masyarakat,

memberikan stabilitas politik, dan memberikan kesempatan bagi partisipasi publik dalam politik. Namun, sistem ini juga memiliki kekurangan seperti kurangnya partisipasi langsung dari warga negara dalam membuat keputusan, serta potensi untuk korupsi oleh para pemimpin.

Di sisi lain, terdapat juga konsep-konsep kekuasaan seperti totalitarianisme dan authoritarianisme. Totalitarianisme adalah bentuk pemerintahan di mana pemerintah memiliki kontrol total atas kehidupan rakyat, termasuk kontrol politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bentuk pemerintahan ini biasanya didukung oleh propaganda dan penindasan atas oposisi. Contoh dari pemerintahan totalitarianisme adalah Jerman Nazi di bawah Adolf Hitler dan Uni Soviet di bawah Joseph Stalin.

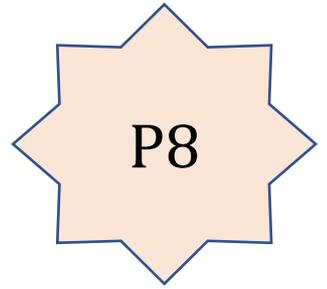
Sementara itu, authoritarianisme adalah bentuk pemerintahan di mana pemerintah memiliki kontrol yang kuat atas kehidupan rakyat, namun tidak secara total. Pemerintahan ini dapat memberikan sedikit kebebasan dalam berbicara atau bergerak, tetapi kontrol pemerintah masih kuat dalam politik dan kehidupan sehari-hari. Contoh dari pemerintahan authoritarian adalah China saat ini di bawah Partai Komunis China.

Pada akhirnya, *Representative Democracy* dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang lebih demokratis karena memungkinkan partisipasi publik yang lebih banyak dan mewakili berbagai kelompok masyarakat. Namun, keputusan dan tindakan para pemimpin dalam sistem ini masih dapat dipengaruhi oleh kepentingan khusus dan politik uang. Oleh karena itu, keterlibatan dan pengawasan publik terhadap para pemimpin sangat penting untuk memastikan pemerintahan yang adil dan berkelanjutan. Lebih detailnya dapat dicermati melalui referensi berikut ini:

1. Dahl, R. A. (1956). *A Preface to Democratic Theory*. University of Chicago Press.

2. Diamond, L. (1999). *Developing Democracy: Toward Consolidation*. The Johns Hopkins University Press.
3. Friedrich, C. J. (1963). *Man and His Government: An Empirical Theory of Politics*. McGraw-Hill Book Company.
4. Linz, J. J., & Stepan, A. (1996). *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*. The Johns Hopkins University Press.

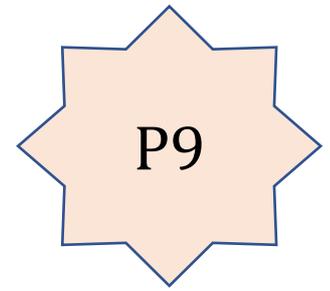
# **UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)**



## **CAPAIAN PEMBELAJARAN**

Mahasiswa akan diberikan sejumlah soal untuk dijawab dan elaborasi lebih lanjut, terkait dengan tema-tema yang telah dijelaskan sebelumnya. Teknik pengumpulan dan penilaian disampaikan kepada mahasiswa, yang juga tergambar dalam penjelasan awal di dokumen ini.

# **BUDAYA POLITIK, SOSIALISASI POLITIK & OPINI PUBLIK**



## **CAPAIAN PEMBELAJARAN**

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memperoleh pemahaman tentang memudarnya budaya politik, subkultur budaya politik, sosialisasi politik, terbentuknya opini publik, dan survei opini publik.

## **BUDAYA POLITIK & OPINI PUBLIK**

Budaya politik adalah suatu konsep yang digunakan untuk menggambarkan kepercayaan, nilai, dan sikap masyarakat terhadap politik serta partisipasi mereka dalam proses politik. Subkultur budaya politik mengacu pada kepercayaan, nilai, dan sikap yang spesifik dari kelompok-kelompok dalam masyarakat yang mempengaruhi cara mereka memandang politik dan partisipasi dalam proses politik. Sementara itu, sosialisasi politik adalah proses di mana individu belajar tentang politik dan menjadi terlibat dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Namun, di era modern, kita seringkali mendengar istilah "memudarnya budaya politik". Hal ini mengacu pada kecenderungan masyarakat untuk menjadi semakin tidak peduli terhadap politik dan partisipasi dalam proses politik. Beberapa faktor yang menyebabkan memudarnya budaya politik adalah:

1. Ketidakpercayaan terhadap politisi dan pemerintah: Banyak orang merasa bahwa politisi dan pemerintah tidak jujur dan tidak memperhatikan kepentingan masyarakat.

2. Kesenjangan antara elit politik dan rakyat: Banyak orang merasa bahwa elit politik hidup dalam dunia yang berbeda dan tidak dapat memahami masalah yang dihadapi oleh rakyat biasa.
3. Dominasi media sosial dan hiburan: Banyak orang lebih tertarik pada konten hiburan di media sosial dan televisi daripada pada berita politik.
4. Kurangnya pendidikan politik: Banyak orang tidak memahami bagaimana politik bekerja dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam proses politik.

Subkultur budaya politik dapat mempengaruhi sikap dan perilaku individu dalam proses politik. Contohnya, kelompok-kelompok yang tergabung dalam subkultur budaya politik konservatif mungkin memiliki sikap dan nilai yang berbeda dengan kelompok-kelompok yang tergabung dalam subkultur budaya politik liberal. Subkultur budaya politik mengacu pada pengelompokan masyarakat berdasarkan sikap dan pandangan politik yang dimilikinya. Menurut Gabriel Almond dan Sidney Verba dalam buku "The Civic Culture", terdapat tiga subkultur budaya politik yaitu:

1. Subkultur Partisipan. Subkultur ini terdiri dari masyarakat yang aktif dalam kegiatan politik seperti pemilihan umum, diskusi politik, atau demonstrasi. Masyarakat dalam subkultur ini memiliki sikap yang mendukung demokrasi, pluralisme, dan partisipasi politik.
2. Subkultur Subyek. Subkultur ini terdiri dari masyarakat yang pasif dalam kegiatan politik. Mereka cenderung menerima keputusan yang diambil oleh elit politik tanpa melakukan tindakan atau kritik. Subkultur ini sering ditemukan pada negara otoriter atau masyarakat yang belum matang dalam pengalaman politik.

3. Subkultur Parokial. Subkultur ini terdiri dari masyarakat yang hanya peduli dengan politik lokal atau kelompok kecilnya saja. Mereka cenderung tidak tertarik dengan politik nasional atau internasional. Subkultur ini sering ditemukan pada masyarakat yang hidup dalam lingkungan tertutup atau terisolasi.

Selanjutnya, sosialisasi politik juga memainkan peran penting dalam pembentukan subkultur budaya politik. Sosialisasi politik merujuk pada proses pembelajaran nilai-nilai, norma, dan sikap politik yang dilakukan melalui keluarga, sekolah, kelompok teman sebaya, dan media massa. Proses ini membentuk pola pikir dan sikap politik masyarakat yang akan mempengaruhi perilaku politiknya di masa depan.

Sosialisasi politik terjadi melalui berbagai lembaga seperti keluarga, sekolah, dan media. Keluarga adalah lembaga pertama yang mempengaruhi sosialisasi politik anak-anak. Sekolah juga memiliki peran penting dalam sosialisasi politik, di mana anak-anak belajar tentang sistem politik dan nilai-nilai yang terkait dengan politik. Media juga memainkan peran penting dalam sosialisasi politik, terutama dalam memberikan informasi dan membentuk opini publik.

Opini publik adalah pendapat atau pandangan masyarakat tentang suatu isu atau peristiwa yang sedang terjadi di lingkungan sosial. Opini publik dapat terbentuk melalui berbagai faktor seperti media massa, kelompok-kelompok kepentingan, pendidikan, agama, dan pengalaman individu. Opini publik dapat memengaruhi keputusan para pemimpin dan juga dapat memengaruhi kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Salah satu cara terbentuknya opini publik adalah melalui media massa. Media massa memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk opini publik karena media massa dapat menjangkau khalayak yang luas. Berita

yang disiarkan oleh media massa dapat membentuk opini publik karena media massa dapat memilih dan menentukan isi berita yang disiarkan.

Selain media massa, kelompok kepentingan juga memiliki pengaruh dalam membentuk opini publik. Kelompok-kelompok kepentingan ini dapat berupa kelompok kepentingan politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Kelompok kepentingan politik dapat membentuk opini publik dengan melakukan kampanye atau propaganda untuk mempengaruhi pandangan masyarakat tentang suatu isu atau peristiwa. Kelompok kepentingan ekonomi juga dapat membentuk opini publik dengan mempengaruhi perekonomian dan pola konsumsi masyarakat.

Pendidikan juga dapat mempengaruhi pembentukan opini publik. Pendidikan yang baik dapat meningkatkan kemampuan kritis masyarakat dalam menilai suatu isu atau peristiwa yang sedang terjadi. Selain itu, agama juga dapat mempengaruhi pembentukan opini publik karena agama seringkali menjadi panduan moral bagi masyarakat.

Pengalaman individu juga dapat memengaruhi pembentukan opini publik. Pengalaman individu dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang suatu isu atau peristiwa. Pengalaman individu dalam hal ini dapat berupa pengalaman langsung maupun pengalaman yang didapat dari orang lain.

Selanjutnya, survei opini publik juga dapat dilakukan untuk mengukur pandangan masyarakat terhadap isu-isu politik tertentu. Survei opini publik dapat memberikan informasi berharga bagi para pengambil keputusan politik untuk mengetahui apa yang menjadi prioritas dan kepentingan masyarakat. Survei opini publik adalah salah satu cara untuk mengukur dan memahami pandangan masyarakat tentang suatu isu atau peristiwa yang sedang terjadi di lingkungan sosial. Survei opini publik dapat dilakukan

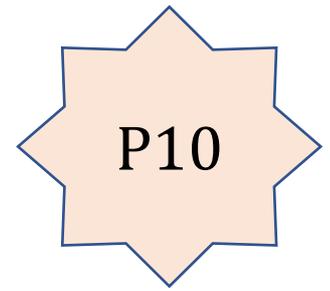
melalui wawancara tatap muka, wawancara telepon, wawancara online, maupun melalui pengisian kuesioner.

Hasil survei opini publik dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengambil keputusan atau membuat kebijakan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Selain itu, hasil survei opini publik juga dapat digunakan oleh kelompok-kelompok kepentingan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat tentang suatu isu atau peristiwa. Namun, survei opini publik juga memiliki kelemahan seperti keakuratan responden yang dapat dipengaruhi oleh faktor demografis, pandangan politik, atau bahkan kelompok kepentingan yang mempengaruhi hasil survei tersebut. Namun, hasil survei opini publik juga perlu diperhatikan karena hasil survei opini publik tidak selalu akurat. Survei opini publik dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti cara pengambilan sampel, teknik pelaksanaan interview, hingga dalam proses analisa dan olah data. Untuk pemahaman lebih lanjut bisa mencermati sejumlah referensi berikut ini:

1. Almond, G. A., & Verba, S. (1980). *The civic culture revisited*. Sage.
2. Campbell, A., Converse, P. E., Miller, W. E., & Stokes, D. E. (1960). *The American voter*. John Wiley & Sons.
3. Dalton, R. J. (2017). *The participation gap: Social status and political inequality*. Oxford University Press.
4. Easton, D. (1965). *A framework for political analysis*. Prentice-Hall.
5. Gunawan, J. (2013). *Budaya politik*. Rajagrafindo Persada.
6. Hetherington, M. J., & Weiler, J. D. (2013). *Authoritarianism and polarization in American politics*. Cambridge University Press.
7. Jennings, M. K., & Niemi, R. G. (1968). The transmission of political values from parent to child. *American Political Science Review*, 62(1), 169-184.

8. Kinder, D. R., & Kiewiet, D. R. (1981). Sociotropic politics: The American case. *British Journal of Political Science*, 11(2), 129-161.
9. Lazarsfeld, P. F., Berelson, B. R., & Gaudet, H. (1944). *The people's choice: How the voter makes up his mind in a presidential campaign*. Columbia University Press.
10. McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176-187.
11. Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon and Schuster.
12. Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and equality: Civic voluntarism in American politics*. Harvard University Press.

# KOMUNIKASI POLITIK & MEDIA



## CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memperoleh pemahaman dan menguasai isu seputar komunikasi politik dan jenis-jenis media dan politik.

## KOMUNIKASI POLITIK & MEDIA

Dalam konteks politik modern, komunikasi politik menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi keputusan politik. Komunikasi politik dapat didefinisikan sebagai segala bentuk komunikasi yang dilakukan oleh aktor-aktor politik dalam rangka mencapai tujuan politik mereka.

Komunikasi politik merupakan komunikasi yang melibatkan pesan politik yang disampaikan antara pemerintah dan masyarakat atau antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam politik. Bentuk komunikasi politik dapat berupa pidato, iklan politik, debat, kampanye politik, dan sebagainya. Komunikasi politik dapat mempengaruhi masyarakat dalam memberikan dukungan pada partai politik atau calon dalam pemilihan umum. Faktor-faktor seperti media politik dan teknologi informasi, opini publik, dan subkultur politik juga mempengaruhi dalam komunikasi politik. Ada beberapa bentuk komunikasi politik yang umum dilakukan, antara lain:

1. Kampanye Politik. Kampanye politik merupakan salah satu bentuk komunikasi politik yang paling umum dilakukan. Kampanye politik

dilakukan oleh kandidat atau partai politik dalam rangka mempengaruhi pemilih untuk memberikan dukungan mereka. Bentuk-bentuk kampanye politik yang umum dilakukan antara lain iklan kampanye, debat politik, pidato politik, dan pertemuan publik.

2. *Lobbying*. *Lobbying* adalah upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam rangka mempengaruhi pembuat keputusan politik dalam hal-hal tertentu. *Lobbying* dilakukan melalui pertemuan, presentasi, dan korespondensi dengan para pembuat keputusan politik.
3. *Public Relations*. *Public Relations (PR)* adalah bentuk komunikasi politik yang bertujuan untuk membangun citra positif suatu individu atau organisasi politik di mata publik. PR dilakukan melalui publikasi pers, acara media, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan popularitas suatu individu atau organisasi politik.
4. *Propaganda*. *Propaganda* adalah bentuk komunikasi politik yang bertujuan untuk mempengaruhi opini publik dengan cara memanipulasi fakta dan informasi. *Propaganda* umumnya dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan tertentu dalam rangka mencapai tujuan politik mereka.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi politik, antara lain:

1. *Ideologi Politik*. Ideologi politik memainkan peran penting dalam bentuk dan konten komunikasi politik. Individu dan kelompok yang memiliki ideologi politik yang sama cenderung menggunakan bahasa dan simbol yang sama dalam berkomunikasi.
2. *Teknologi informasi*. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara komunikasi politik dilakukan. Media sosial, situs web, dan aplikasi pesan instan memungkinkan individu

dan kelompok untuk berkomunikasi dengan cara yang lebih cepat dan mudah. Teknologi informasi memungkinkan pesan politik untuk disebarkan dengan cepat dan efektif. Media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram memungkinkan partai politik atau calon untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dan mendapatkan dukungan secara online.

3. Konteks Politik. Konteks politik, seperti sistem pemerintahan, kebijakan publik, dan perubahan sosial, dapat mempengaruhi cara komunikasi politik dilakukan. Contohnya, dalam sistem pemerintahan otoriter, bentuk-bentuk komunikasi politik yang kritis dapat dilarang atau dihambat.
4. Opini publik dapat mempengaruhi bagaimana pesan politik diterima oleh masyarakat. Jika opini publik negatif terhadap partai politik atau calon tertentu, pesan politik tersebut mungkin tidak efektif dalam memperoleh dukungan dari masyarakat.
5. Subkultur politik adalah kelompok masyarakat yang memiliki pandangan politik yang sama. Subkultur politik dapat mempengaruhi cara masyarakat menerima pesan politik dan memilih calon dalam pemilihan umum.

Selanjutnya, setiap bentuk media politik memiliki peran dan pengaruh yang berbeda dalam membentuk opini publik dan memengaruhi kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah. Berikut ini beberapa jenis media politik dan pengaruhnya:

1. Media cetak merupakan salah satu bentuk media politik yang telah ada sejak lama, seperti surat kabar, majalah, dan buku. Media ini memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk opini publik dan memberikan informasi tentang kebijakan politik. Namun, dalam era digital saat ini,

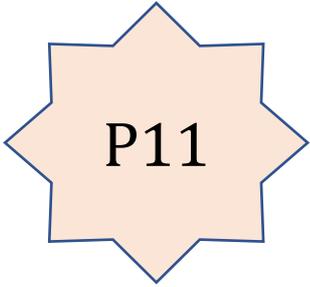
media cetak cenderung kurang diminati oleh generasi muda dan lebih banyak dibaca oleh kalangan yang lebih tua.

2. Media sosial telah menjadi bentuk media politik yang sangat populer di era digital. Beberapa platform media sosial yang populer di Indonesia antara lain Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Media sosial memberikan akses yang lebih mudah dan cepat untuk berkomunikasi dan berbagi informasi dengan publik. Namun, media sosial juga dapat menyebarkan informasi yang tidak akurat atau memprovokasi, sehingga dapat menyebarkan hoaks dan memengaruhi opini publik secara negatif.
3. Televisi adalah media politik yang paling populer di Indonesia. Stasiun televisi itu sering menyiarkan program politik seperti debat kandidat, liputan berita politik, dan wawancara dengan pejabat publik. Televisi memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik, terutama di kalangan masyarakat yang kurang terampil dalam membaca dan menulis.
4. Radio masih menjadi media politik yang penting di Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan kota-kota kecil. Radio dapat menjangkau daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh media lain. Radio sering menyiarkan program-program politik seperti wawancara dengan pejabat publik, liputan berita politik, dan diskusi politik.
5. Blog dan situs web politik memungkinkan orang untuk menulis dan membagikan pandangan mereka tentang politik secara online. Blog dan situs web politik sering menampilkan artikel, opini, dan wawancara dengan pejabat publik. Namun, blog dan situs web politik sering kali menjadi platform untuk mempromosikan pandangan yang ekstrim dan memprovokasi.

Untuk pemahaman lebih lanjut, dapat mencermati sejumlah referensi sebagai berikut:

1. McQuail, D. (2010). *McQuail's mass communication theory* (6th ed.). London: Sage Publications.
2. Patterson, T. E. (2013). The media's role in governing. *Annual Review of Political Science*, 16, 167-181.
3. Norris, P. (2000). *A virtuous circle: Political communications in postindustrial societies*. Cambridge: Cambridge University Press.
4. Blumler, J. G., & Kavanagh, D. (1999). The third age of political communication: Influences and features. *Political Communication*, 16(3), 209-230.
5. Gunther, R. (1992). CBS News and JFK's assassination: A tale of two tragedies. *Journal of Communication*, 42(4), 139-151.
6. McLeod, J. M., Daily, K., Guo, Z., Eveland, W. P., Jr., & Bayer, J. B. (1999). News media, civic engagement, and the informed public. *Communication Research*, 26(5), 550-573.
7. Prior, M. (2007). *Post-broadcast democracy: How media choice increases inequality in political involvement and polarizes elections*. New York: Cambridge University Press.
8. Stromer-Galley, J. (2000). On-line interaction and why candidates avoid it. *Journal of Communication*, 50(4), 111-132.
9. Ward, S. J. A. (2002). *Political advertising in democratic societies: Campaigning for hearts and minds*. London: Sage Publications.
10. West, D. M. (2005). *Digital government: Technology and public sector performance*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

# **PARTAI POLITIK, KELOMPOK KEPENTINGAN DAN PEMILU**



P11

## **CAPAIAN PEMBELAJARAN**

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memperoleh pemahaman tentang kelompok kepentingan, fungsi partai politik, jenis-jenis partai politik, partai politik dan demokrasi dan sistem kepartaian.

## **PARPOL & PEMILU**

Dalam sebuah sistem demokrasi, partai politik merupakan salah satu institusi politik yang sangat penting. Partai politik berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat serta menjadi wadah bagi warga negara untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingannya dalam mengambil keputusan politik. Dalam artikel ini, akan dijelaskan tentang fungsi partai politik, jenis-jenis partai politik, dan sistem kepartaian dalam demokrasi. Partai politik memiliki beberapa fungsi yang sangat penting dalam sebuah sistem politik. Fungsi-fungsi tersebut antara lain:

1. Mewakili kepentingan masyarakat. Partai politik mewakili kepentingan masyarakat dalam sistem politik. Partai politik menjadi wadah bagi warga negara untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingannya dalam mengambil keputusan politik.
2. Membangun konsensus politik. Partai politik berperan dalam membangun konsensus politik dalam masyarakat. Partai politik

mengusung program-program politik yang dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat sehingga dapat membangun konsensus politik dalam masyarakat.

3. Menjaga stabilitas politik. Partai politik dapat menjaga stabilitas politik dalam sebuah negara. Partai politik yang kuat dapat menghindarkan terjadinya krisis politik dan mampu mengatasi perbedaan-perbedaan dalam masyarakat.
4. Menjaga integritas dan transparansi politik. Partai politik dapat membantu menjaga integritas dan transparansi politik dalam sebuah negara. Partai politik yang bertanggung jawab akan membuka diri terhadap kritik dan pengawasan dari masyarakat serta melakukan tindakan pencegahan terhadap korupsi dan kejahatan politik.
5. Mengatur pengambilan keputusan politik. Partai politik berperan dalam mengatur pengambilan keputusan politik dalam sebuah negara. Partai politik yang kuat dapat mengendalikan proses pengambilan keputusan politik sehingga dapat menghindarkan terjadinya kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat.
6. Rekrutmen dan Pelatihan Kepemimpinam. Partai politik juga bertanggung jawab dalam merekrut dan melatih kader-kader politik yang berpotensi untuk menjadi pemimpin masa depan. Partai politik dapat memberikan pelatihan dan pendidikan politik kepada anggota partainya, sehingga mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memimpin di masa depan.

Selanjutnya, sistem kepartaian politik adalah suatu sistem yang mengatur partai politik dalam suatu negara. Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam demokrasi. Mereka berfungsi sebagai wakil rakyat untuk mengajukan kepentingan rakyat dalam pembuatan kebijakan publik dan

menjalankan fungsi pengawasan atas pemerintah. Partai politik juga menjadi sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Sistem kepartaian politik bisa bermacam-macam, tergantung pada sejarah, budaya, dan kebijakan politik negara masing-masing. Di beberapa negara, sistem kepartaian dikendalikan oleh pemerintah atau otoritas politik, sementara di negara lain, partai politik berfungsi secara independen dan memiliki kekuatan yang besar dalam pengambilan keputusan politik.

Jenis-jenis sistem kepartaian politik:

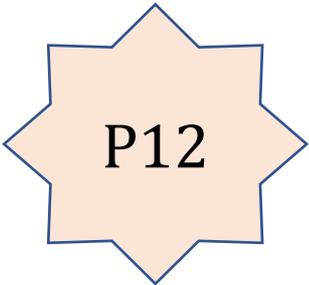
1. Sistem dua partai. Sistem dua partai adalah sistem kepartaian politik di mana hanya ada dua partai politik yang memegang kendali atas proses politik dan pemilihan umum. Sistem ini banyak diterapkan di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris.
2. Sistem multipartai. Sistem multipartai adalah sistem kepartaian politik di mana terdapat lebih dari dua partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan umum dan memiliki peran penting dalam proses politik. Sistem ini banyak diterapkan di negara-negara seperti India dan Jerman.
3. Sistem satu partai. Sistem satu partai adalah sistem kepartaian politik di mana hanya ada satu partai politik yang diperbolehkan dalam sistem politik negara. Sistem ini banyak diterapkan di negara-negara seperti Cina dan Korea Utara.

Untuk pemahaman lebih lanjut, bisa mencermati daftar bacaan sebagai berikut:

1. Bardi, L., & Morisi, D. (2020). *The System of Political Parties: A Comparative Analysis*. Routledge.

2. Katz, R. S., & Mair, P. (2018). *Democracy and the Cartelization of Political Parties*. Oxford University Press.
3. Panebianco, A. (2015). *Political Parties: Organization and Power*. Cambridge University Press.
4. Mainwaring, S., & Scully, T. R. (Eds.). (2018). *Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America*. Stanford University Press.
5. Togeby, L. (2016). *Political Parties and Elections: Legislating for Representative Democracy*. Routledge.
6. Ware, A. (2016). *Political Parties and Party Systems*. Oxford University Press.
7. Sartori, G. (2018). *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*. ECPR Press.
8. Gunther, R., & Diamond, L. (Eds.). (2015). *Political Parties and Democracy*. JHU Press.
9. Gerring, J. (2017). *Party Systems and Country Governance*. Springer.
10. Casal Bértoa, F. (2019). *Political Parties and Democracy: Contemporary Western Europe and Asia*. Palgrave Macmillan.

# LEMBAGA LEGISLATIF DAN SISTEM PEMERINTAHAN



P12

## CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memperoleh pemahaman tentang Fungsi legislatif, Legislatif sistem presidensial, Legislatif sistem parlementer, dan Legislatif sistem campuran.

## LEMBAGA LEGISLATIF

Fungsi legislatif dalam suatu negara adalah sangat penting dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang menyangkut pembuatan undang-undang, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, serta memberikan keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. Di berbagai negara, bentuk sistem legislatif dapat berbeda-beda, tergantung pada sistem pemerintahan dan politik yang dianut.

Sistem legislatif dalam sebuah negara bisa dibagi menjadi tiga, yaitu sistem presidensial, sistem parlementer, dan sistem campuran. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing sistem legislatif:

1. Legislatif sistem presidensial. Legislatif sistem presidensial adalah sistem di mana kepala negara dan kepala pemerintahan terpisah, dengan presiden sebagai kepala negara dan eksekutif, dan parlemen sebagai lembaga legislatif. Dalam sistem ini, parlemen memiliki kekuatan untuk mengesahkan undang-undang, tetapi tidak memiliki kekuasaan untuk menggulingkan pemerintah. Presiden dipilih

langsung oleh rakyat dan memiliki kekuasaan veto terhadap undang-undang yang disetujui oleh parlemen. Beberapa contoh negara yang menganut sistem presidensial adalah Amerika Serikat, Brasil, dan Filipina.

2. Legislatif sistem parlementer. Legislatif sistem parlementer adalah sistem di mana kepala negara dan kepala pemerintahan tergabung menjadi satu, dengan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dan parlemen sebagai lembaga legislatif. Dalam sistem ini, parlemen memiliki kekuasaan untuk mengesahkan undang-undang dan juga memiliki kekuasaan untuk menggulingkan pemerintah jika tidak percaya dengan kinerjanya. Beberapa contoh negara yang menganut sistem parlementer adalah Inggris, Jerman, dan Jepang.
3. Legislatif sistem campuran. Legislatif sistem campuran adalah sistem yang menggabungkan elemen-elemen dari kedua sistem sebelumnya. Dalam sistem ini, kepala negara adalah presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan kepala pemerintahan adalah perdana menteri yang dipilih oleh parlemen. Parlemen memiliki kekuasaan untuk mengesahkan undang-undang dan juga memiliki kekuasaan untuk menggulingkan pemerintah jika tidak percaya dengan kinerjanya. Presiden juga memiliki kekuasaan veto terhadap undang-undang yang disetujui oleh parlemen. Beberapa contoh negara yang menganut sistem campuran adalah Prancis, Rusia, dan Korea Selatan.

Fungsi legislatif dalam sistem pemerintahan adalah sangat penting, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Tugas utama legislatif adalah membuat undang-undang, melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, dan memberikan keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. Dalam sistem demokrasi, fungsi legislatif

juga meliputi mewakili kepentingan rakyat dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam sistem presidensial, fungsi legislatif dilakukan oleh badan legislatif atau dewan perwakilan rakyat (DPR) yang terpisah dari kekuasaan eksekutif. Di sisi lain, dalam sistem parlementer, fungsi legislatif dilakukan oleh parlemen atau majelis yang terdiri dari anggota parlemen dan dipimpin oleh perdana menteri.

Dalam sistem campuran, fungsi legislatif terbagi antara parlemen dan presiden, dengan parlemen memiliki hak untuk mengesahkan undang-undang dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah, sementara presiden memegang kekuasaan untuk memimpin pemerintahan dan mengeksekusi undang-undang.

Fungsi legislasi dalam sistem politik sangat penting, terutama dalam memastikan keseimbangan kekuasaan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Selain itu, fungsi legislasi juga meliputi:

1. Membuat undang-undang. Fungsi utama legislatif adalah membuat undang-undang yang merupakan aturan resmi yang harus diikuti oleh warga negara. Undang-undang yang dihasilkan harus mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta mampu menjaga kestabilan dan ketertiban dalam masyarakat.
2. Pengawasan pemerintah. Legislatif memiliki tugas untuk mengawasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa pemerintah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan, serta mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.
3. Anggaran dan keuangan negara. Legislatif bertanggung jawab dalam mengatur anggaran dan keuangan negara. Anggaran negara yang disusun harus mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat,

serta memberikan manfaat bagi pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat.

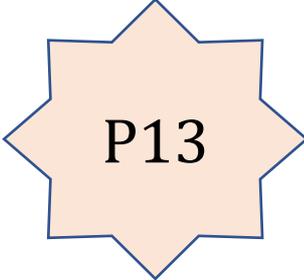
Dalam sistem presidensial, DPR merupakan badan legislatif yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Sementara itu, dalam sistem parlementer, parlemen memiliki fungsi yang lebih luas, yaitu memilih dan mengawasi perdana menteri, serta membuat undang-undang.

Di Indonesia, DPR merupakan badan legislatif yang memiliki peran dan fungsi untuk mewakili kepentingan rakyat, membuat undang-undang, serta melakukan pengawasan terhadap pemerintah. DPR terdiri dari dua kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Berikut daftar bacaan selanjutnya:

1. Epstein, L. D., & O'Halloran, S. (1999). *Delegating Powers: A Transaction Cost Politics Approach to Policy Making under Separate Powers*. Cambridge University Press.
2. Fishkin, J. S. (2011). *When the People Speak: Deliberative Democracy and Public Consultation*. Oxford University Press.
3. Grofman, B., Koetzle, W., & Brunell, T. L. (2007). *A handbook of legislative research*. Cambridge University Press.
4. Lijphart, A. (1999). *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. Yale University Press.
5. Linz, J. J., & Stepan, A. (1996). *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*. Johns Hopkins University Press.

6. Mainwaring, S. (1993). Presidentialism, multipartism, and democracy: The difficult combination. *Comparative political studies*, 26(2), 198-228.
7. McLean, I. (2010). *What's wrong with parliament?. Polity.*
8. Powell Jr, G. B. (2000). *Elections as instruments of democracy: Majoritarian and proportional visions.* Yale University Press.
9. Strom, K. (1990). *Minority government and majority rule.* Cambridge University Press.
10. Tsebelis, G. (2002). *Veto players: How political institutions work.* Princeton University Press.

# LEMBAGA EKSEKUTIF & BIROKRASI



P13

## CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memperoleh pemahaman tentang eksekutif sistem presidensial, parlementer, dan campuran, birokrasi dan fungsi birokrasi.

## LEMBAGA EKSEKUTIF & BIROKRASI

Sistem pemerintahan di berbagai negara biasanya memiliki tiga cabang kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Cabang eksekutif merupakan kekuasaan yang mengeksekusi atau menjalankan kebijakan pemerintah.

1. Sistem Eksekutif dalam Sistem Pemerintahan Presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial, kepala negara dan kepala pemerintahan dijabat oleh satu orang yaitu presiden. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki kekuasaan eksekutif yang sangat besar, seperti mengambil keputusan penting terkait kebijakan pemerintah, mengeksekusi undang-undang, dan menjalankan kebijakan luar negeri. Presiden juga memilih para menteri yang bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan pemerintah dan membentuk kabinet.
2. Sistem Eksekutif dalam Sistem Pemerintahan Parlementer. Dalam sistem pemerintahan parlementer, kepala negara dijabat oleh seorang raja atau ratu yang memiliki kekuasaan simbolis belaka, sedangkan kepala pemerintahan dijabat oleh seorang perdana menteri yang

dipilih oleh parlemen. Perdana menteri memiliki kekuasaan eksekutif yang lebih terbatas dibandingkan dengan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial. Perdana menteri tidak bisa mengambil keputusan penting secara sendiri, melainkan harus mempertimbangkan keinginan dan persetujuan dari parlemen.

3. Sistem Eksekutif dalam Sistem Pemerintahan Campuran. Dalam sistem pemerintahan campuran atau semi-presidensial, kepala negara dijabat oleh seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan kepala pemerintahan dijabat oleh seorang perdana menteri yang dipilih oleh parlemen. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang lebih besar dibandingkan dengan perdana menteri, namun tetap dibatasi oleh konstitusi dan hukum yang berlaku. Perdana menteri memiliki kekuasaan eksekutif yang lebih terbatas, namun tetap bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan pemerintah dan membentuk kabinet. Dalam sistem presidensial dan parlementer digabungkan, pemerintahan dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan terdapat pula parlemen yang memiliki peran dalam pembuatan undang-undang. Namun, dalam beberapa kasus, sistem campuran ini dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam pembagian kekuasaan antara eksekutif dan legislatif.

Selanjutnya, birokrasi merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pemerintahan karena berperan dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Birokrasi dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan. Fungsi birokrasi antara lain melaksanakan kebijakan pemerintah, menyediakan informasi untuk membuat kebijakan, menjaga stabilitas dan

keamanan negara, serta memberikan layanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Birokrasi adalah sistem administrasi publik yang terdiri dari pegawai negeri yang bekerja untuk pemerintah dan bertanggung jawab atas penyediaan layanan publik. Birokrasi memiliki peran penting dalam menjalankan kebijakan publik dan menyediakan layanan publik yang efektif dan efisien. Namun, birokrasi sering dianggap lambat dan sulit untuk berubah, sehingga dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan publik yang efektif. Dalam beberapa kasus, birokrasi juga dapat terlibat dalam korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Birokrasi memiliki beberapa fungsi penting dalam sistem pemerintahan, antara lain:

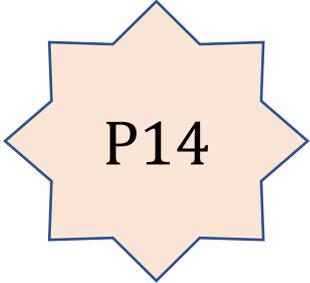
1. Implementasi Kebijakan Publik. Birokrasi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Birokrasi juga memastikan bahwa layanan publik disediakan dengan baik dan efisien.
2. Pelaksanaan Peraturan dan Hukum. Birokrasi bertanggung jawab atas penerapan peraturan dan hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Birokrasi juga memastikan bahwa hukum dan peraturan tersebut dipatuhi oleh semua warga negara.
3. Pemberian Layanan Publik. Birokrasi bertanggung jawab atas penyediaan layanan publik yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Layanan publik yang disediakan oleh birokrasi antara lain kesehatan, pendidikan, transportasi, dan perumahan.
4. Penyusunan Kebijakan Publik. Birokrasi juga terlibat dalam penyusunan kebijakan publik sebagai langkah perumusan petunjuk langkah pemerintahan.

Selain itu, di setiap sistem pemerintahan, birokrasi memainkan peran penting dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah. Birokrasi terdiri dari sejumlah besar pegawai pemerintah yang memainkan peran penting dalam pelaksanaan kebijakan publik. Fungsi utama birokrasi adalah menerapkan dan menjalankan kebijakan yang telah disetujui oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Namun, dalam beberapa kasus, birokrasi dapat menjadi korup atau bertindak tidak efektif dalam menjalankan tugasnya.

Oleh karena itu, untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas birokrasi, sering kali diperlukan reformasi birokrasi yang memperkuat integritas dan kapasitas pegawai pemerintah serta mempromosikan transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kesimpulannya, sistem pemerintahan memiliki peran penting dalam menentukan cara suatu negara diatur dan dipimpin. Sistem presidensial, parlementer, dan campuran semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Penting untuk memahami karakteristik dan fungsi dari setiap sistem pemerintahan, sehingga dapat memilih sistem pemerintahan yang paling tepat dan efektif untuk kebutuhan masyarakat dan negara.

1. Lijphart, A. (1999). *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. New Haven: Yale University Press.
2. Mainwaring, S. (1993). Presidentialism, Multipartyism, and Democracy: The Difficult Combination. *Comparative Political Studies*, 26(2), 198-228.
3. Shugart, M. S., & Carey, J. M. (1992). *Presidents and Assemblies: Constitutional Design and Electoral Dynamics*. New York: Cambridge University Press.
4. Weber, M. (1964). Bureaucracy. In H. H. Gerth & C. W. Mills (Eds.), *From Max Weber: Essays in Sociology* (pp. 196-244). New York: Oxford University Press.

# LEMBAGA YUDISIAL & PERADILAN



P14

## CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memperoleh pemahaman dan menguasai tentang jenis-jenis hukum, fungsi yudisial, peran peradilan dalam demokrasi.

## LEMBAGA YUDISIAL & PERADILAN

Hukum memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat dan negara, termasuk dalam sistem demokrasi. Dalam demokrasi, hukum merupakan penjaga hak dan kebebasan individu, memastikan keadilan, dan menyelesaikan konflik di antara pihak yang berbeda. Dalam artikel ini, kita akan membahas tentang jenis-jenis hukum, fungsi yudisial, dan peran peradilan dalam demokrasi. Terdapat beberapa jenis hukum yang berlaku di dunia, di antaranya:

1. Hukum Adat. Hukum adat adalah hukum yang berkembang di dalam masyarakat tertentu dan diterapkan berdasarkan tradisi dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut. Hukum adat seringkali digunakan untuk menyelesaikan konflik di antara anggota masyarakat.
2. Hukum Agama. Hukum agama adalah hukum yang berdasarkan pada ajaran agama tertentu. Hukum agama digunakan untuk mengatur

perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat yang mengikuti agama tersebut.

3. Hukum Positif. Hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh pemerintah dan diakui oleh masyarakat, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata usaha negara, hukum tata niaga, dan lainnya. Hukum ini diatur dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan lainnya.

Selanjutnya, hukum positif sendiri memiliki berbagai jenis yang harus dipahami oleh masyarakat, terutama oleh para pelaku hukum dan orang-orang yang terlibat dalam proses peradilan. Hukum juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan suatu negara. Artikel ini akan membahas tentang jenis-jenis hukum dan fungsi yudisial dalam demokrasi. Jenis-Jenis Hukum sebagai berikut:

1. Hukum pidana. Hukum pidana mengatur tentang pelanggaran hukum dan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku kejahatan. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban sosial.
2. Hukum perdata. Hukum perdata mengatur tentang hubungan antara individu atau organisasi dalam masyarakat. Hukum perdata mencakup berbagai masalah, seperti hak milik, kontrak, dan harta warisan.
3. Hukum administrasi. Hukum administrasi mengatur tentang hubungan antara pemerintah dan warga negara. Hukum administrasi mencakup berbagai masalah, seperti perizinan, pelayanan publik, dan tata cara pemerintahan.
4. Hukum internasional. Hukum internasional mengatur tentang hubungan antara negara-negara di dunia. Hukum internasional

mencakup berbagai masalah, seperti perjanjian perdagangan, hak asasi manusia, dan konflik internasional.

Selanjutnya, yudisial atau lembaga peradilan memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan keamanan di negara demokrasi. Berikut adalah beberapa fungsi yudisial dalam demokrasi:

1. Menegakkan hukum. Yudisial memiliki tugas untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Dalam sebuah negara demokrasi, lembaga peradilan harus bebas dari campur tangan pihak manapun, baik itu pemerintah maupun kepentingan pribadi. Fungsi utama yudisial adalah menjaga keadilan di dalam masyarakat. Yudisial harus dapat memastikan bahwa setiap individu atau kelompok masyarakat memiliki hak yang sama di depan hukum.
2. Melindungi hak-hak warga negara. Yudisial bertugas untuk melindungi hak-hak warga negara. Lembaga peradilan harus memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di depan hukum, tanpa diskriminasi.
3. Menjaga keseimbangan kekuasaan. Lembaga peradilan memiliki peran dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudisial. Yudisial harus dapat menegakkan hukum tanpa tekanan atau intervensi dari kekuasaan lainnya.
4. Menjamin keadilan dan ketertiban sosial. Yudisial bertugas untuk menjaga keadilan dan ketertiban sosial di masyarakat. Dalam hal ini, lembaga peradilan harus dapat menegakkan hukum secara adil dan berdasarkan fakta yang objektif.
5. Menjamin Hak Asasi Manusia. Yudisial bertugas untuk menjamin hak asasi manusia di dalam masyarakat. Yudisial harus dapat memastikan

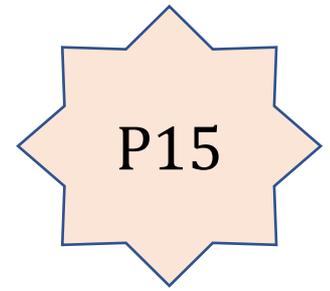
bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan dan perlindungan dari hukum.

Selanjutnya, silakan cermati sumber referensi berikut ini:

1. Ruskola, T. (2015). *Legal Orientalism: China, the United States, and Modern Law*. Harvard University Press.
2. Rosenfeld, M. (2017). *Constitutionalism: Past, Present, and Future*. Oxford University Press.
3. Yoo, J. (2016). *The Powers of War and Peace: The Constitution and Foreign Affairs after 9/11*. University of Chicago Press.
4. Jackson, V. C. (2018). *Constitutional engagement in a transnational era*. Oxford University Press.
5. Barzilai, G. (2017). *Communities and Law: Politics and Cultures of Legal Identities*. University of Michigan Press.
6. Elster, J., & Slagstad, R. (Eds.). (2018). *Constitutionalism and Democracy*. Cambridge University Press.
7. Kairys, D. (Ed.). (2016). *The Politics of Law: A Progressive Critique*. Basic Books.
8. Kagan, R. A. (2018). *Adversarial legalism: The American way of law*. Harvard University Press.
9. Whittington, K. E. (2018). *Political Foundations of Judicial Supremacy: The Presidency, the Supreme Court, and Constitutional Leadership in US History*. Princeton University Press.
10. Burbank, S. B., & Friedman, M. D. (2017). *Comparative Law: Historical Development of the Civil Law Tradition in Europe, Latin America, and East Asia*. West Academic.

11. Osiel, M. J. (2017). *The end of reciprocity: Terror, torture, and the law of war*. Cambridge University Press.
12. Hirschl, R. (2018). *Comparative Matters: The Renaissance of Comparative Constitutional Law*. Oxford University Press.
13. Teubner, G. (2017). *Constitutional Fragments: Societal Constitutionalism and Globalization*. Oxford University Press.
14. Dorsen, N., & Rosenfeld, M. (Eds.). (2017). *The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law*. Oxford University Press.
15. Stone Sweet, A., & Mathews, J. T. (2018). *Proportionality Balancing and Constitutional Governance: A Comparative and Global Approach*. Oxford University Press.

# **HUBUNGAN ILMU POLITIK & HUBUNGAN INTERNASIONAL**



## **CAPAIAN PEMBELAJARAN**

Mahasiswa diharapkan bisa memahami dan bisa menganalisa tentang kekuasaan dan kepentingan nasional, perdamaian dunia, kedaulatan, kebijakan luar negeri, dan ekonomi politik internasional.

## **ILMU POLITIK & STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Ilmu politik merupakan rumah besar bagi studi hubungan internasionale. Konsep-konsep dalam ilmi politik memiliki kaitan erat dengan kajian Hubungan Internasional. Kekuasaan dan kepentingan nasional, perdamaian dunia, kedaulatan, kebijakan luar negeri, dan ekonomi politik internasional merupakan topik yang sangat penting dalam hubungan internasional. Setiap negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda yang menjadi landasan dalam membuat kebijakan luar negeri mereka. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara lebih rinci mengenai topik-topik tersebut dan bagaimana mereka berinteraksi dalam hubungan internasional.

Kekuasaan nasional mengacu pada kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau tindakan di tingkat internasional. Ini dapat mencakup kekuatan ekonomi, militer, dan diplomasi. Kepentingan nasional, di sisi lain, merujuk pada kepentingan suatu negara yang perlu dipertahankan, dilindungi, dan diperjuangkan. Kepentingan nasional dapat

mencakup keamanan, kesejahteraan, dan status negara tersebut di mata dunia internasional.

Perdamaian dunia menjadi salah satu tujuan utama dalam hubungan internasional. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai upaya seperti dialog, negosiasi, dan kerja sama internasional. Selain itu, organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga berperan penting dalam mempromosikan perdamaian dunia melalui penyelesaian konflik, pengawasan dan pemeliharaan perdamaian.

Kedaulatan merupakan konsep yang penting dalam hubungan internasional yang menunjukkan bahwa suatu negara memiliki kontrol penuh atas wilayah, kebijakan, dan keputusan mereka. Namun, konsep ini sering menimbulkan konflik antara negara-negara karena beberapa negara memiliki kepentingan yang berbenturan dengan kedaulatan negara lain.

Kebijakan luar negeri merupakan keputusan yang diambil oleh suatu negara untuk mempromosikan kepentingan nasional mereka di luar negeri. Hal ini melibatkan berbagai aspek seperti politik, ekonomi, keamanan, dan budaya. Kebijakan luar negeri juga melibatkan hubungan diplomatik, perdagangan internasional, serta partisipasi dalam organisasi internasional.

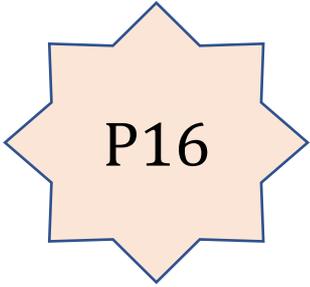
Ekonomi politik internasional (IPE) melibatkan studi tentang hubungan antara kekuasaan politik dan sistem ekonomi di tingkat internasional. IPE mempelajari dampak kebijakan ekonomi pada negara dan bagaimana negara-negara berinteraksi dalam perdagangan dan investasi. Hal ini melibatkan analisis tentang faktor-faktor seperti perdagangan internasional, lembaga keuangan internasional, investasi asing, serta regulasi perdagangan dan investasi.

Dalam hubungan internasional, kekuasaan dan kepentingan nasional memainkan peran penting dalam menentukan tindakan suatu negara. Perdamaian dunia dan kedaulatan menjadi tujuan penting dalam hubungan

internasional, sementara kebijakan luar negeri dan IPE menjadi instrumen penting untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing negara dan dunia internasional. Untuk pemahaman lebih lanjut, silakan cermati sumber-sumber referensi berikut ini:

1. Hill, C. (2017). *International Relations and the European Union*. Oxford University Press.
2. Nye, J. S. (2011). *The future of power*. Public Affairs.
3. Jervis, R. (2017). *Perception and Misperception in International Politics: New Edition*. Princeton University Press.
4. Waltz, K. N. (2018). *Theory of international politics*. Waveland Press.
5. Keohane, R. O., & Nye, J. S. (2011). Power and interdependence revisited. *International Organization*, 65(2), 277-293.
6. Goldstein, J. S., & Pevehouse, J. C. (2014). *International relations*. Pearson.
7. Doyle, M. W. (2017). The question of intervention: John Stuart Mill and the Responsibility to Protect. *Ethics & International Affairs*, 31(2), 191-212.
8. Wendt, A. (2015). Anarchy is what states make of it: The social construction of power politics. *International Security*, 40(1), 46-71.
9. Hurrell, A. (2014). International society and the study of regional integration. *International Affairs*, 90(1), 71-86.
10. Ikenberry, G. J. (2018). The future of the liberal world order: Internationalism after America. *Foreign Affairs*, 97(2), 70-83.

# **UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)**



P16

## **CAPAIAN PEMBELAJARAN**

Mahasiswa akan diberikan sejumlah soal untuk dijawab dan elaborasi lebih lanjut, terkait dengan tema-tema yang telah dijelaskan sebelumnya. Teknik pengumpulan dan penilaian disampaikan kepada mahasiswa, yang juga tergambar dalam penjelasan awal di dokumen ini. Di akhir perkuliahan ini, mahasiswa juga akan diminta untuk merefleksikan pemahaman mereka tentang konsep-konsep dasar dalam ilmu politik, dan bagaimana mengontekstualisasikannya ke dalam studi Hubungan Internasional sebagai bagian dari pencabangan dalam ilmu politik itu sendiri.